

2025

LAPORAN KINERJA (LAKIP)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMBAS

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan pada tahun 2025 yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tentunya terdapat kekurangan dan keterbatasan, untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas.

Sambas, Februari 2026
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMBAS**

RIZA SUNANDA, S.T., M.T., M.Eng
Pembina (IV/a)
NIP. 19720215 200212 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	2
3. Tupoksi.....	2
4. Sumber Daya Aparatur.....	5
5. Sumber Daya Keuangan.....	9
6. Sarana dan Prasarana.....	11
B. PERMASALAHAN UTAMA.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENSTRA	
1. Visi.....	14
2. Misi.....	15
3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	16
B. PERJANJIAN KINERJA.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	19
B. REALISASI ANGGARAN.....	29
BAB IV PENUTUP	
A. SIMPULAN UMUM.....	31
B. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA.....	32
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

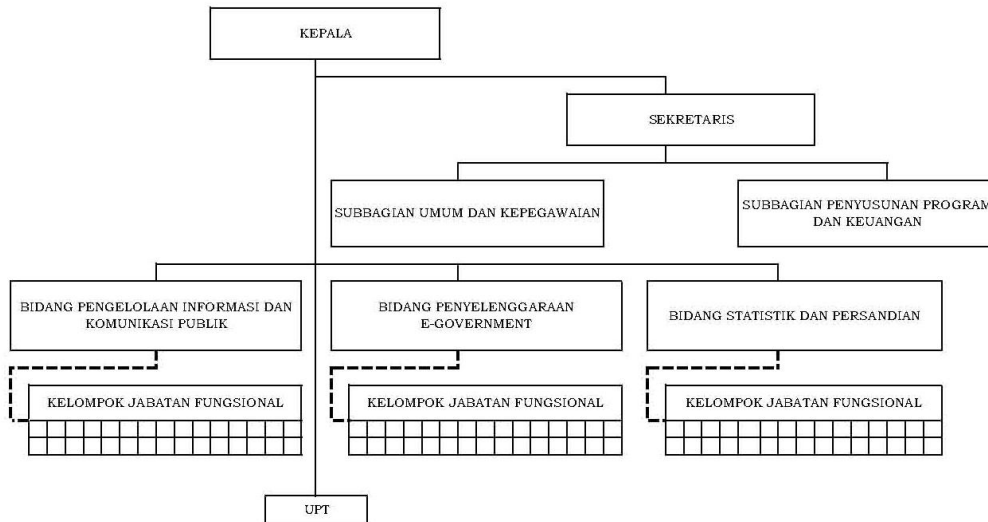
Reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut berupa Laporan Kinerja.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas,.

2. Susunan Organisasi

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMBAS
TIPE A

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMBAS



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

(Signature)
MARJUNI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680612 199310 1 001

BUPATI SAMBAS,

tttd

SATONO

3. Tupoksi

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas yang kemudian diadakan perubahan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas.

a. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika Sambas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Sambas sesuai peraturan perundang undangan.

b. Fungsi

1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian sesuai peraturan perundangundangan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan;
6. pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas yang kemudian diadakan perubahan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, dan pelaporan kegiatan dinas di bidang komunikasi dan Informatika, statistik serta persandian sesuai peraturan Perundang-undangan

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat, membawahi:

a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan pelaporan Dinas.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan opini dan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, layanan informasi publik dan hubungan media.

4. Bidang Penyelenggaraan *E-Government*

Bidang Penyelenggaraan *E-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi, pengembangan, pengelolaan Data dan Aplikasi serta Layanan *e-government*.

5. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta

pembinaan teknis di bidang pengamanan sandi dan statistik.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas berjumlah 23 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20 (dua puluh) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3 (tiga) orang. Sedangkan Tenaga Honorar berjumlah 13 (tiga belas) orang.

Rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Persebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorar per unit kerja

Uraian	Unit Kerja / Bidang			
	Sekretariat	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)	Penyelenggaraan e-government	Statistik dan Persandian
Berdasarkan Kategori :				
• PNS	6	5	3	6
• PPPK	1	2	-	-
• Tenaga Honorar	5	5	1	2
Jumlah	12	12	4	8

Berdasarkan Golongan :				
• Gol IV	2	-	1	1
• Gol III	2	4	2	3
• Gol II	2	1	-	2
• Gol I	-	-	-	-
Jumlah	6	5	3	6
Berdasarkan Jabatan :				
• Ess. II	1	-	-	-
• Ess. III	1	1	1	1
• Ess. IV	1	-	-	-
• Fungsional Tertentu	-	1	-	5
• Fungsional Umum	3	3	2	-
Jumlah	6	5	3	6
Berdasarkan Pendidikan Terakhir :				
• SD				
ASN	-	-	-	-
Tenaga Honorer	-	-	-	-
• SMP				
ASN	1	-	-	-
Tenaga Honorer	-	-	-	-
• SMA				
ASN	1	1	-	-
Tenaga Honorer	3	-	1	1
• DIPLOMA				
ASN	-	2	-	3
Tenaga Honorer	-	1	-	
• S1				
ASN	4	4	2	2
Tenaga Honorer	2	4	-	1
• S2				
ASN	1	-	1	1
Tenaga Honorer	-	-	-	-
• S3				
ASN	-	-	-	-
Tenaga Honorer	-	-	-	-
Jumlah	12	12	4	8

Tabel 1.2
Daftar Nama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorer
Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan Terakhir

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	Pendidikan Terakhir
Pegawai Negeri Sipil (PNS)				
1	RIZA SUNANDA, S.T.,MT., M.Eng	Pembina (IV/a)	Plt. Kepala Dinas	S-2
2	INDRA GUNAWAN, S.IP	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	S-1
3	RIZA SUNANDA, S.T.,MT., M.Eng	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	S-2
4	HAIRUDDIN. S.Kom, M.Si	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Governmen	S-2
5	U. ERWIN APRIADI, S.Ak	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan komunikasi Publik	S-1
6	ASWANDI, S.STP	Penata (III/c)	Kasubbag Penyusunan Program Dan Keuangan	D-IV
7	NUR ASIKIN, A.md	Penata Tk.I (III/d)	Sandiman Ahli Muda	D-3
8	ARI HANDOYO, S.IP	Penata Tk.I (III/d)	Pranata Humas Ahli Muda	S-1
9	WIRDA SASMITA, S.Si	Penata Tk.I (III/d)	Statistisi Ahli Muda	S-1
10	SUJATMIKO	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Keuangan	SMA
11	HENDRIYANTO	Pengatur (II/c)	Fungsional Umum	SMP
12	ISWANDI, A.Md	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengelola Teknologi Informasi	D-3
13	HABIBI, S.Tr.Kom	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Informasi	S-1
14	M.IQBAL KAMALUDIN, S.Kom	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	S-1
15	LISTARI, S. Stat	Penata Muda (III/a)	Statistis Ahli Pertama	S-1
16	IRHAS NUR HUDA, A.Md	Pengatur (II/c)	Sandiman Terampil	D-3
17	NOVAL NURALIF, A.Md	Pengatur (II/c)	Sandiman Terampil	D-3

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	Pendidikan Terakhir
Pegawai Negeri Sipil (PNS)				
18	UNIQUE ADHANA DINTA,S.Kom	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1
19	TULUS PRASETYA ZAIME,S.I.Kom	Penata Muda (III/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S-1
20	OTHMAN ALYDRUS,S.Kom	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)				
21	ADE KURNIAWAN, A.Md	VII	Pranata Komputer Terampil	D-3
22	NURMANSYAH,S.H	IX	Penata Layanan Operasional	S-1
23	ASPIAN	V	Penata Layanan Operasional	SMA
Tenaga Honorer				
24	TRI NUGROHO	-	Honorer	SMA
25	HARY RINALDI	-	Honorer	SMA
26	DWI HANDAYANI, SE	-	Honorer	S-1
27	CAHAYADI, ST	-	Honorer	S-1
28	AHKMAD TAUDIN	-	Honorer	SMA
29	SEPTINARIA	-	Honorer	SMA
30	ELITA,S.Pd	-	Honorer	S-1
31	RISANDO,S.Pd	-	Honorer	S-1
32	HADY HARDIANSYAH	-	Honorer	SMA
33	ASYWADI, A.Md	-	Honorer	D-3
34	SRI YULANDARI, S.Sos	-	Honorer	S-1
35	GUSTARI, S.Kom	-	Honorer	S-1
36	YULI HIDAYATI, S.M	-	Honorer	S-1

5. Sumber Daya Keuangan

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 4.650.514.927,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.642.014.927,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 8.500.000,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.220.175.672,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.421.839.255,00. adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1.3
Sumber Daya Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sambas Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Rp4.650.514.927,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp3.281.445.909,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp43.915.563,00
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp5.263.534,00
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp6.450.786,00
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp4.318.449,00
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp27.882.794,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.592.356.805,00
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.220.175.672,00
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp363.526.285,00
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp8.654.848,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp374.651.909,00
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp48.851.326,00
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp80.698.173,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp64.348.030,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp120.528.000,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp9.180.000,00
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp0,00
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp9.180.000,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp110.495.632,00
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.623.332,00
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp104.872.300,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp150.846.000,00
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp126.120.000,00
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp11.406.000,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp712.975.909,00

2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp712.975.909,00
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp606.058.315,00
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Rp19.543.712,00
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Rp11.515.001,00
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp75.858.881,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp427.734.496,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.661.641,00
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Rp7.661.641,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp420.072.855,00
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Rp28.123.609,00
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Rp362.052.469,00
2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Rp18.750.817,00
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Rp9.349.169,00
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp1.796.791,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp126.992.634,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp126.992.634,00
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp32.178.322,00
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Rp29.854.916,00
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Rp14.603.655,00
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Rp16.671.352,00
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Rp33.684.389,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp101.365.979,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp83.189.736,00
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp16.861.952,00
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp17.879.076,00
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp24.575.502,00
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp23.873.206,00
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp18.176.243,00
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp18.176.243,00
JUMLAH		Rp4.650.514.927,00

6. Sarana Dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas masih belum memadai atau masih sangat kurang. Adapun Aset Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sambas sebagai berikut:

Tabel 1.4
Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas

No	Barang Inventaris	Jumlah	Keterangan
1	Sepeda Motor	16	Unit
2	Lemari Besi/Metal	3	Buah
3	Mesin Absensi	2	Unit
4	LCD Proyektor/Infocus	1	Unit
5	Kursi Besi/Metal	7	Buah
6	Web Camera	6	Buah
7	Kursi Besi/Metal	43	Buah
8	Meja ½ Biro	24	Set
9	Kursi Tamu	2	Buah
10	A.C Split	16	Buah
11	Televisi	1	Unit
12	Tape Recorder	1	Unit
13	Loudspeaker	2	Unit
14	Wireless	1	Unit
15	Tustel	1	Unit
16	Handy Cam	1	Unit
17	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
18	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	buah
19	Meja Operator	1	Buah
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Buah
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Buah
22	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	Buah
23	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1	Buah
24	Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis	1	buah
25	Audio Mixing Console	3	Unit
26	Compeck Discplayer	1	Unit
27	Microphone/Wireless MIC	4	Buah
28	Pistol Grip	1	Unit
29	Video Mixer	2	Unit
30	Tripod Camera	6	Unit
31	Head Set	1	Unit
32	Lighting Mechanic	2	Unit
33	Camera Digital	15	Unit
34	GPS Receiver	1	Unit
35	Drone/UAV	3	Unit

No	Barang Inventaris	Jumlah	Keterangan
36	Telepone Mobile	3	Unit
37	Handy Talky (HT)	7	Unit
38	Radio Communication Matching Switch (RCMS)	1	Unit
39	Guy Tower	8	Unit
40	Mainframe (Komputer Jaringan)	4	Unit
41	PC Unit	22	Unit
42	Laptop	22	Buah
43	Tablet PC	3	Unit
44	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	Buah
45	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	Buah
46	Exsternal Portble Hardisk	11	Buah
47	Stabilizer/UPS (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit
48	Router	17	Unit
49	Aksespoint	4	Unit

B. PERMASALAHAN UTAMA

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut. Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas Tahun 2025 antara lain:

1. Masih kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait, mengingat banyak kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika yang melibatkan lintas sektor dan membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi.
2. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas terutama pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pelaksana dimasing-masing OPD;

3. Belum didukungnya operasional Dinas Komunikasi dan Informatika dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai.
4. Ketersediaan infrastruktur TIK dan sistem informasi yang masih terbatas dan belum terintegrasi.
5. Belum optimalnya pengelolaan data sektoral yang berkualitas dan terintegrasi.
6. Pengelolaan sistem keamanan informasi masih belum optimal.
7. Kapasitas dan jumlah SDM pengelolaan informasi publik, pengelola TIK, statistik dan persandian masih terbatas

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun kedepan, Motto yang dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah “**Sambas Berkemajuan**”, yang dapat dimaknai sebagai:

- Sambas Beriman, adalah kondisi kehidupan masyarakatnya yang agamis, berian dan takwa pada Allah (Tuhan YME), taat dan tertib hukum serta penyelenggaraan pemerintahan yang *Good and Clean Government*.
- Sambas Kemandirian, adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari kemampuan produksi daerah, yang ditandai dengan tercapai swasembada pangan, kegiatan ekonominya berkembang baik, kreatif dan inovatif serta meningkatnya kegiatan investasi.
- Sambas Maju, adalah suatu kondisi dimana kualitas sosial, moral, intelektual dan perekonomian masyarakat makmur dan maju. Ditandai dengan berjalannya perekonomian melalui prinsip ekonomi kerakyatan, meningkatnya pendapatan daerah, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat yang ditunjang dengan infrastruktur dasar yang memadai.
- Sambas Berkelanjutan, adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan yang sudah baik tetap dilanjutkan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya manusia dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Atas dasar pertimbangan Motto “**Sambas Berkemajuan**” serta visi RPJPD Kabupaten Sambas dan pencapaian RPJMD lima tahun pertama (Tahun 2006 - 2011), lima tahun kedua (Tahun 2012 - 2016), lima tahun ketiga (Tahun 2017 – 2021) dan lima tahun keempat (tahun 2021-2024) serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka visi pembangunan

daerah Tahun 2021 - 2026 adalah :

“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sambas yang dirumuskan itu diharapkan mampu memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

Perumusan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut :

1. Beriman, adalah kondisi kehidupan masyarakatnya yang agamis, berian dan takwa pada Allah (Tuhan YME), taat dan tertib hukum serta penyelenggaraan pemerintahan yang *good and clean Government*.
2. Kemandirian, adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari kemampuan produksi daerah, yang ditandai dengan tercapai swasembada pangan, kegiatan ekonominya berkembang baik, kreatif dan inovatif serta meningkatnya kegiatan investasi.
3. Maju, adalah suatu kondisi dimana kualitas sosial, moral, intelektual dan perekonomian masyarakat makmur dan maju. Ditandai dengan berjalannya perekonomian melalui prinsip ekonomi kerakyatan, meningkatnya pendapatan daerah, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat yang ditunjang dengan infrastruktur dasar yang memadai.
4. Berkelanjutan, adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan yang sudah baik tetap dilanjutkan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya manusia dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

2. MISI

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas maka dirumuskan 5 Misi pembangunan Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat

dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, industri, pendidikan dan bidang lainnya..
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang intelektual, kreatif, inovatif dan berdaya saing.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
5. Meningkatkan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas dalam melaksanakan Visi dan Misi Kabupaten Sambas selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah Meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

B. Sasaran

Adanya sasaran-sasaran yang menjadi pokok keberhasilan dalam kegiatan pelaksanaan program oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

C. Indikator Kinerja Utama

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Diseminasi informasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk masyarakat Kab. Sambas

2. Persentase kualitas tata kelola dan layanan sistem pemerintahan berbasis teknologi elektronik (*e-government*).
3. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
4. Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana kerja ini merupakan suatu program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melalui berbagai kegiatan yang di muat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dan tata kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Diseminasi informasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk masyarakat Kab. Sambas	100%
		Persentase kualitas tata kelola dan layanan sistem pemerintahan berbasis teknologi elektronik (<i>e-government</i>)	85%
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%
		Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	46%

Dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diatas dapat kita lihat terdapat 1 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja. Dari 4 Indikator Kinerja yang dapat diukur untuk melihat kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas pada Tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.281.445.909,00 yang merupakan dana APBD.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan jumlah anggaran sebesar Rp 712.975.909,00 yang merupakan dana APBD
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan jumlah anggaran sebesar Rp 427.734.496,00 yang merupakan dana APBD
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan jumlah anggaran sebesar Rp 126.992.634,00 yang merupakan dana APBD
5. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 101.365.979,00 yang merupakan dana APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tersebut didasarkan pada persentase capaian target Tahun 2025.

1. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target Th N	Realisasi Th N	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Diseminasi informasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk masyarakat Kab. Sambas	100%	96,84%	96,84%
		Persentase kualitas tata kelola dan layanan sistem pemerintahan berbasis teknologi elektronik (e-government)	85%	72,75%	85,6%
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
		Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	46%	74%	150%

Berdasarkan indikator yang memperlihatkan tingkat capaian kinerja sasaran tersebut diatas, secara umum dapat disimpulkan sangat berhasil. Keberhasilan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas dapat juga dilihat dari penggunaan sumber daya anggaran dalam melaksanakan program kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Analisis atas pengguna sumber daya anggaran

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	712.975.909,00	711.383.809,00	99,78	96,84
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	427.734.496,00	417.525.081,00	97,61	85,6
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	126.992.634,00	123.615.434,00	97,34	100
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi	101.365.979,00	97.569.582,00	96,25	150

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Diseminasi informasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk masyarakat Kab. Sambas merupakan indikator penting dari sasaran ini. Pada tahun 2025, kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target indikator ini yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM Pelayanan Informasi Publik
2. Melakukan rapat koordinasi berkala dengan PPID Pelaksana
3. Koordinasi dan Konsultasi dengan PPID Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi

Informasi.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas selaku PPID Utama Kabuapten Sambas berhasil menempati peringkat ke-6 pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik se-Kalimantan Barat Tahun 2025 kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dengan raihan nilai 96,84 dengan kualifikasi "**Informatif**". Pencapaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mana Pemerintah Kabupaten Sambas meraih kualifikasi "**Menuju Informatif**".

- b. Analisis keberhasilan/kegagalan tingkat Pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) di Kabupaten Sambas, dapat diuraikan sebagai berikut :
- 1) Realisasi diperoleh dari Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sambas Tahun 2024 sebesar 2,91 dengan kategori Baik. Penggunaan nilai tahun 2024 dilakukan karena pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sambas tidak dilakukan penilaian SPBE oleh Kementerian PANRB sehubungan dengan peralihan kebijakan nasional dari SPBE menuju Pemerintahan Digital (PEMDI).
 - 2) Capaian kinerja mencapai 85,6% dari target yang ditetapkan dan menunjukkan pengelolaan SPBE telah berjalan cukup efektif. Keberhasilan didukung oleh terpenuhinya aspek kebijakan internal, perencanaan strategis SPBE, TIK, penyelenggara SPBE, manajemen SPBE, serta layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik. Namun demikian, masih terdapat aspek yang belum optimal, khususnya pada pelaksanaan Audit TIK.
 - 3) Penguatan dari Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik terlihat dari dengan adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang. perencanaan, penganggaran dan keuangan melalui penerapan SIPD, pengadaan barang dan jasa dengan aplikasi LPSE,

kepegawaian dengan menerapkan SIASN dan MYASN, kearsipan dinamis melalui aplikasi Srikandi, dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan aplikasi e-Sakip, dan Kinerja Pegawai memanfaatkan Ekinerja sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik.

- 4) Layanan Publik Berbasis Elektronik terdapat Layanan Pengaduan Pelayanan Publik SP4N Lapor, Layanan data terbuka, dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan aplikasi JDIH, serta beberapa aplikasi yang digunakan untuk layanan publik sektoral di Kabupaten Sambas, yaitu: penggunaan aplikasi OSS dan SICANTIK untuk memberikan layanan perizinan, aplikasi SIMANTEP (Sistem Informasi Antrian Online RSUD Pemangkat) yang digunakan untuk pendaftaran antrian RS, dan aplikasi pemanfaatan ELSMIL (Elektronik Siap Nikah Dan Hamil) dari BKKBN. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Kabupaten Sambas menjadi efektif dan efisien baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Pada tahun 2025, penilaian SPBE tidak dilakukan oleh Kemenpan RB untuk Pemerintah Kabupaten Sambas. Hal ini dikarenakan pada tahun ini merupakan tahun transisi dari SPBE ke Pemdi(Pemerintahan Digital).

- c. Analisis penggunaan data statistik sektoral untuk Perencanaan dan monitoring evaluasi Pembangunan Daerah dapat dilihat dari penggunaan data sektoral pada penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2022 – 2026 (Perencanaan) serta penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (monitoring Evaluasi Pembangunan).

Dalam upaya Penguatan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan kegiatan

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Akan tetapi, pada tahun 2025, EPSS tidak dilakukan oleh BPS.

- d. Analisis keberhasilan pencapaian target terkait pengelolaan keamanan informasi ditandai dengan OPD yang sudah mulai menggunakan layanan keamanan informasi seperti Tanda Tangan Elektronik(TTE), sudah mulai melakukan laporan apabila ada insiden cyber ke Tim Tanggap Insiden Siber(CSIRT) dan proses berbagi berita menggunakan Sanapati masih digunakan.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan capaian kinerja 2025 dan 2024

No.	Sasaran Strategis	IKU	Capaian Kinerja 2024			Capaian Kinerja 2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Diseminasi informasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk masyarakat Kab. Sambas	100%	100%	100%	100%	96,84%	96,84%
		Persentase kualitas tata kelola dan layanan sistem pemerintahan berbasis teknologi elektronik (<i>e-goverment</i>)	75%	73%	97%	85%	72,75%	85,6%
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun	95%	95%	100%	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	IKU	Capaian Kinerja 2024			Capaian Kinerja 2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		perencanaan pembangunan daerah						
		Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	43%	39%	91%	46%	74%	150%

2. Dari hasil capaian kinerja tahun ini dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan target akhir yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas dengan rincian tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi kinerja		Target Akhir RPJMD
			Th n-1	Th n	
1.	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Gonernace</i>)	Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Diseminasi informasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk masyarakat Kab. Sambas	100%	96,84%	100%
		Persentase kualitas tata kelola dan layanan sistem pemerintahan berbasis teknologi elektronik (e-government)	73%	72,75%	85%
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	95%	100%	100%
		Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	39%	74%	50%

3. Analisis hambatan / kendala yang dirasakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas dalam upaya pencapaian target indikator kinerja antara lain:

a. Hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Diseminasi informasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk masyarakat Kab. Sambas, yaitu :

- 1) PPID Pelaksana belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) PPID Pelaksana juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masyarakat masih ragu untuk memohon informasi langsung melalui PPID Pelaksana.
- 3) Kurangnya pemahaman PPID Pelaksana dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku.
- 4) Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah/ OPD sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi public Karena Keterbatasan Anggaran.
- 5) Belum semua OPD dan Desa mempunyai website PPID sebagai sarana publikasi informasi yang efektif.
- 6) Penyusunan DIP yang belum optimal dari seluruh OPD di Kabupaten Sambas.
- 7) Rawan Kecenderungan Penyalahgunaan Informasi oleh Pemohon Informasi terutama informasi keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa
- 8) Belum adanya regulasi yang jelas mengatur tentang penyalahgunaan informasi.

- b. Hambatan dalam pengelolaan SPBE sebagai berikut :
- 1) Tidak dilaksanakannya penilaian SPBE Tahun 2025 oleh Kementerian PANRB akibat transisi kebijakan SPBE ke PEMDI.
 - 2) Masih lemahnya usaha peningkatan pelaksanaan terutama pada Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE,
 - 3) Masih belum memiliki Pelaksanaan Audit TIK yang mengatur terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya pelaksanaan secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan belum cukup untuk Aspek Pelaksanaan Audit TIK.
- c. Hambatan yang dihadapi di dalam pelaksanaan statistik sektoral yaitu daftar data sebagian besar OPD masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan kondisi data real yang dimiliki oleh masing-masing OPD.
- d. Hambatan dalam pencapaian target kinerja pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yaitu :
- 1) Masih kecilnya tingkat kesadaran terkait layanan keamanan informasi
 - 2) Penggunaan Sanapati sudah mulai berkurang dan kecepatan pengiriman pesan menjadi terlambat dibandingkan media lain

4. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keberhasilan dan upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala untuk pencapaian sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas antara lain:
 - a. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Diseminasi informasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk masyarakat Kab. Sambas, yaitu :
 - 1) Melakukan Rakor PPID dan PPID Pelaksana serta Penguatan pemahaman terkait UU KIP dan Perki no 1 tahun 2021 bagi PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi Publik.
 - 2) Menyusun Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas
 - 3) Mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh KI dan Lembaga lainnya baik secara Luring maupun Daring untuk meningkatkan kompetensi SDM agar lebih kompeten dalam pengelolaan informasi publik.
 - 4) Kerjasama dengan organisasi non-pemerintah dalam optimalisasi PPID di Kabupaten Sambas seperti Yappika dan Usaid Erat.
 - 5) Pengembangan Website PPID Desa untuk 193 Desa di Kabupaten Sambas dan menambahkan menu PPID pada website OPD.
 - 6) Mendorong OPD untuk menyusun Daftar Informasi Publik dan di uplod ke Si-Kedip
 - 7) Melakukan Edukasi dan Pendekatan kepada Pemohon Informasi terkait Pemanfaatan Informasi Publik dan selalu berkoordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Barat terkait penggunaan informasi public.
 - b. Upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan SPBE, yaitu :
 - 1) Menggunakan nilai Indeks SPBE Tahun 2024 sebagai dasar pengukuran kinerja, memperkuat koordinasi Tim SPBE lintas OPD, serta melakukan persiapan dan penyesuaian kebijakan menuju penerapan Pemerintahan

- Digital (PEMDI).
- 2) Menyesuaikan kebijakan dan tata kelola SPBE menuju Pemerintahan Digital (PEMDI) untuk mendukung kolaborasi dan integrasi layanan digital sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sambas.
 - 3) Menetapkan Aspek Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Manajemen Pemerintahan Digital, serta Perencanaan Strategis Pemerintahan Digital sebagai prioritas peningkatan.
 - 4) Mempersiapkan pemenuhan indikator dan kriteria penilaian sebagai dasar peningkatan kinerja pada evaluasi Pemerintahan Digital (PEMDI) selanjutnya.
- c. Dalam pencapaian target yang direncanakan, dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya :
- 1) Penguatan Portal Open Data Sambas,
 - 2) Pelatihan penyusunan Daftar Data, Standar data, Metadata, dan Kode referensi.
- d. Dalam rangka mengatasi hambatan dalam pencapaian target kinerja pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, upaya yang dilakukan antara lain :
- 1) Melakukan sosialisasi terkait layanan keamanan informasi
 - 2) Tetap melakukan pengiriman berita seperti biasa sembari menunggu informasi terbaru terkait penggunaan Sanapati kedepannya

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 4.650.514.927,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.642.014.927,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 8.500.000,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.220.175.672,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.421.839.255,00.

Adapun Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD 2025 sebesar Rp. 4.435.350.639,00 atau mencapai 95,37 % yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.426.914.639,00 atau 95,37 % dan Belanja Modal sebesar Rp. 8.436.000,00 atau 99,25 %. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai/gaji sebesar Rp 2.043.055.307,00 atau 92,02 % dan Belanja Barang dan Jasa dan sebesar Rp. 2.383.859.332,00 atau 98,43 %.

Realisasi anggaran secara rinci dapat dilihat pada Lampiran. Sedangkan untuk realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja SKPD sesuai dengan dokumen Penjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dan tata kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Diseminasi informasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk masyarakat Kab. Sambas	712.975.909,00	711.383.809,00	99,78
		Persentase kualitas tata kelola dan layanan sistem pemerintahan berbasis teknologi elektronik (<i>e-government</i>)	427.734.496,00	417.525.081,00	97,61
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	126.992.634,00	123.615.434,00	97,34

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	101.365.979,00	97.569.582,00	96,25

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

Demikian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas Tahun 2025 yang merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas pada tahun 2025. Pada awal tahun pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021- 2026 ada beberapa pencapaian yang telah berhasil dilaksanakan namun sejalan dengan hal tersebut banyak pula permasalahan yang bermunculan dan harus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen terhadap upaya menata pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sambas.

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2025 ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang mampu mendukung tercapainya sasaran sebagaimana diuraikan diatas. Adapun keberhasilan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang diinginkan didukung oleh antara lain:

1. Perencanaan yang telah mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Tersedianya fasilitas dan dukungan dana yang memadai;
3. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
4. Tersedianya dokumen perencanaan yang telah tersusun secara hirarkis, konsisten dan saling berkaitan sehingga mempermudah proses pelaporan akuntabilitas kinerja.

B. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

Secara khusus langkah-langkah peningkatan kinerja per tiap indikator di masa yang akan datang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan kinerja pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Diseminasi informasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk masyarakat Kab. Sambas, antara lain :
 - a. Koordinasi dengan PPID Pelaksana secara berkala dan berkesinambungan
 - b. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan SDM Pelayanan Publik
 - c. Jemput Bola Pembinaan PPID Desa.
 - d. Sosialisasi pelayanan PPID secara berkala

2. Upaya peningkatan kinerja pengelolaan SPBE, yaitu :
 - a. Menyusun dan menyesuaikan kebijakan daerah terkait Pemerintahan Digital (PEMDI).
 - b. Mengoptimalkan penerapan Audit TIK secara bertahap.
 - c. Meningkatkan integrasi dan interoperabilitas aplikasi antar-OPD.
 - d. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola SPBE/Pemerintahan Digital.
 - e. Memperkuat koordinasi dan monitoring kinerja digital pemerintah daerah.

3. Dalam upaya peningkatan hasil capaian IPS dan Indeks SDI di Tahun 2026, ada beberapa hal yang telah dipersiapkan yaitu:
 - a. Peningkatan kapasitas SDM Pengolah Data dengan pelaksanaan rapat rutin dan intens,
 - b. Penguatan portal open data Sambas dengan memberikan konsultasi bagi operator Open Data, serta
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyusunan daftar data dan standar data bagi OPD.

4. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, beberapa rencana kegiatan yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Meningkatkan sosialisasi penggunaan layanan keamanan informasi seperti Tanda Tangan Elektronik(TTE)
 - b. Menunggu informasi terbaru terkait penggunaan Sanapati sebagai media berbagi berita antar Daerah mengingat penggunaan Srikandi sudah mulai diprioritaskan
 - c. Melakukan sosialisasi terkait pelaporan insiden siber melalu Tim Tanggap Insiden Siber(CSIRT)

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Sambas, Februari 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMBAS**



RIZA SUNANDA, S.T.,M.T.,M.Eng
Pembina (IV/a)
NIP. 19720215 200212 1 005

Lampiran 1:

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Rp4.650.514.927,00	Rp4.435.350.639,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp3.281.445.909,00	Rp3.085.256.733,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp43.915.563,00	Rp40.678.863,00
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp5.263.534,00	Rp5.263.534,00
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp6.450.786,00	Rp6.450.786,00
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp4.318.449,00	Rp4.318.449,00
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp27.882.794,00	Rp24.646.094,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.592.356.805,00	Rp2.409.973.268,00
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.220.175.672,00	Rp2.043.055.307,00
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp363.526.285,00	Rp358.263.113,00
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp8.654.848,00	Rp8.654.848,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp374.651.909,00	Rp367.675.007,00
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp48.851.326,00	Rp48.850.638,00
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp80.698.173,00	Rp80.692.168,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp64.348.030,00	Rp64.347.964,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp120.528.000,00	Rp113.557.857,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp9.180.000,00	Rp9.116.000,00
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp0,00
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp0,00	Rp0,00
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp9.180.000,00	Rp9.116.000,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp110.495.632,00	Rp107.017.695,00
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.623.332,00	Rp5.584.950,00
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp104.872.300,00	Rp101.432.745,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp150.846.000,00	Rp150.795.900,00
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp126.120.000,00	Rp126.090.900,00
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp11.406.000,00	Rp11.400.000,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp712.975.909,00	Rp711.383.809,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp712.975.909,00	Rp711.383.809,00
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp606.058.315,00	Rp604.858.315,00
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Rp19.543.712,00	Rp19.475.412,00
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Rp11.515.001,00	Rp11.341.201,00
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp75.858.881,00	Rp75.708.881,00

2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp427.734.496,00	Rp417.525.081,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.661.641,00	Rp7.661.641,00
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Rp7.661.641,00	Rp7.661.641,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp420.072.855,00	Rp409.863.440,00
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Rp28.123.609,00	Rp26.050.398,00
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Rp362.052.469,00	Rp354.351.665,00
2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Rp18.750.817,00	Rp18.315.417,00
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Rp9.349.169,00	Rp9.349.169,00
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp1.796.791,00	Rp1.796.791,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp126.992.634,00	Rp123.615.434,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp126.992.634,00	Rp123.615.434,00
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp32.178.322,00	Rp31.730.622,00
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Rp29.854.916,00	Rp29.127.116,00
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Rp14.603.655,00	Rp14.429.855,00
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Rp16.671.352,00	Rp16.160.952,00
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Rp33.684.389,00	Rp32.166.889,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp101.365.979,00	Rp97.569.582,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp83.189.736,00	Rp79.410.739,00
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp16.861.952,00	Rp16.277.252,00
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp17.879.076,00	Rp17.118.276,00
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp24.575.502,00	Rp22.440.402,00
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp23.873.206,00	Rp23.574.809,00
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp18.176.243,00	Rp18.158.843,00
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp18.176.243,00	Rp18.158.843,00
JUMLAH		Rp4.650.514.927,00	Rp4.435.350.639,00

